

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga kerja adalah sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki potensi, kemampuan, berpribadi dan berperan dalam pembangunan, sehingga berhasil guna bagi diri dan masyarakat. Terkait dengan hal ini, aspek yang terkandung dalam SDM adalah aspek potensial, aspek fungsional, aspek operasional, aspek personal, dan aspek produktivitas. Perhatian khusus banyak diberikan kepada pengembangan SDM karena adanya kesadaran bahwa indikator kemajuan negara banyak dipengaruhi oleh kualitas SDM. Tujuan pengembangan SDM di tingkat nasional adalah untuk mengintegrasikan SDM ke dalam pembangunan sehingga terjadi penggunaan SDM yang rasional dan efektif (Barthos 2002). Efektif dalam arti pemilihan profesi dengan benar. Kesadaran ini juga terkait dengan peran institusi yang tidak hanya sebagai organisier, namun berperan sebagai think tank pengembangan SDM. Efek desentralisasi dalam otonomi daerah diharapkan dapat memproses pengembangan ini lebih tajam sesuai dengan sumber daya, peluang dan kebutuhan masing-masing daerah.

Bisnis perikanan tangkap merupakan sektor yang paling rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena jauh dari sistem hukum dan pengawasan negara. Berbeda dari bisnis di daratan yang dapat mudah diawasi, bisnis perikanan tangkap sulit menerapkan standar perlindungan yang peka HAM. Dalam penelitian Damarsidi (2017) di jelaskan bahwa terdapat permasalahan yang menimpa TKI ABK Perikanan Taiwan diantaranya gaji yang tidak di bayarkan,

kekerasan fisik maupun mental, serta jam kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. ILO selama ini juga lebih sering mengawasi kondisi dan lingkungan kerja di daratan, padahal pekerja di sektor perikanan juga berhak mendapatkan lingkungan pekerjaan yang baik. Pekerja di bidang perikanan berhak mendapatkan hak dasar, di antaranya akomodasi, makanan, jaminan kesehatan, upah, dan perlindungan sosial.

Andriyani et al., (2019) mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui analisis yang dilakukan sebagai indikator EAFM terhadap semua parameter sumber daya ikan, menghasilkan penilaian kondisi ekosistem WPP 712 pada masing-masing indikator yaitu habitat 112.50 (buruk), sumber daya ikan 133.33 (kurang baik), teknis penangkapan ikan 150.00 (kurang baik), sosial ekonomi 185.71 (sedang) dan kelembagaan 166.67 (sedang) (KKP, 2011). Menurut Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2017 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa potensi perikanan di WPP 712 sebesar 1.341.631 ton dengan nilai pemanfaatan beberapa kategori sumber daya ikan telah melebihi angka 1 yang berarti termasuk dalam kategori fully- exploited, hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penangkapan di WPP 712 sudah mencapai overfishing sehingga kegiatan penangkapan harus dikurangi.

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712 yang terletak di wilayah utara Pulau Jawa terdiri dari 8 provinsi dan memiliki 164 pelabuhan perikanan. Menurut Triarso (2012) potensi perikanan tangkap di Pantai Utara Jawa Tengah terindikasi telah mengalami tangkap lebih (overfishing) yang salah satunya

disebabkan oleh tekanan penangkapan yang didominasi oleh perikanan tangkap skala kecil yang banyak beroperasi di perairan pantai. Berdasarkan data mengenai jumlah kapal perikanan yang diperoleh dari website data statistik resmi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menyatakan bahwa total kapal perikanan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Provinsi Lampung mencapai 174.362 buah kapal, yang terdiri dari kapal jukung, kapal motor tempel, kapal motor berukuran <5 GT hingga kapal berukuran 100-200 GT (KKP 2012). Jumlah kapal yang banyak memberikan kesempatan bagi tamatan SMKN 3 Kota Pariaman untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat bekerja di kapal ikan.

Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja, mengakui bahwa pengawasan ketenagakerjaan di sektor perikanan tidak bisa maksimal karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan. Oleh karena itu, mereka berencana membentuk lembaga pengawasan untuk mengidentifikasi ketenagakerjaan perikanan, diantaranya dengan koordinasi Bersama kementerian perhubungan. Meskipun sejumlah kementerian sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing, Kementerian Tenaga Kerja berpendapat, tenaga kerja perikanan memiliki karakteristik unik dan spesifik yang membutuhkan perlakuan khusus. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seharusnya juga menjadi focal point dari rencana ini, mengingat KKP, melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga memiliki kewenangan untuk meningkatkan keterampilan pekerja perikanan tangkap di Indonesia. (Bisnis Indonesia, 2015).

Di Indonesia, pekerjaan di sektor perikanan dan industri kelautan berhubungan dengan pekerja lokal dan migran. Secara khusus, jumlah penduduk yang bekerja sebagai pekerja migran di sektor perikanan dan kelautan meningkat selama beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, pada tahun 2011, pekerja di sektor perikanan dan kelautan adalah 2,33 persen dari semua pekerja migran yang terdaftar, dan pada tahun 2014, angka ini meningkat menjadi 4,67 persen (Adam, 2016).

Melihat kondisi tersebut namun tidak sesiring dengan data tamatan SMK 3 Kota Pariaman yang bekerja di Kapal ikan. SMKN 3 Kota Pariaman adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang mempunyai jurusan bidang keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan, Teknika Kapal Penangkap Ikan. Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kota Pariaman adalah sebagai pusat pendidikan dan latihan vokasi, yang menghasilkan tamatan SMK berkarakter, kompeten, dengan skill tingkat menengah sesuai bidangnya, dan mampu menghadapi pasar kerja yang kompetitif di tingkat nasional menuju era global melalui pendidikan yang bermutu, Pendidik dan tenaga Kependidikan serta sarana prasarana pendidikan sesuai standar Dudi, didukung dengan keterbukaan Informasi.

Dari 863 tamatan SMK N 3 Kota Pariaman hanya 378 orang siswa yang bekerja di kapal ikan, maka dari itu sangat diperlukan analisa mengenai faktor-faktor apa saja yang memotivasi siswa agar lebih tertarik untuk bekerja di kapal ikan. Faktor minat siswa untuk bekerja di kapal disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya adalah upah bekerja, jam kerja, waktu waktu sandar dan izin orangtua. Dari pernyataan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis

melakukan penelitian, tentang **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BEKERJA BAGI TAMATAN SMKN 3 KOTA PARIAMAN DI KAPAL IKAN DALAM DAN LUAR NEGERI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat bekerja bagi tamatan SMKN 3 Kota Pariaman di kapal ikan dalam dan luar negeri?
2. Bagaimana strategi peningkatan motivasi bekerja di kapal ikan bagi siswa SMKN 3 Kota Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain, untuk:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat bekerja bagi tamatan SMKN 3 Kota Pariaman di kapal ikan dalam dan luar negeri.
2. Menganalisis strategi peningkatan motivasi bekerja di kapal ikan bagi siswa SMKN 3 Kota Pariaman

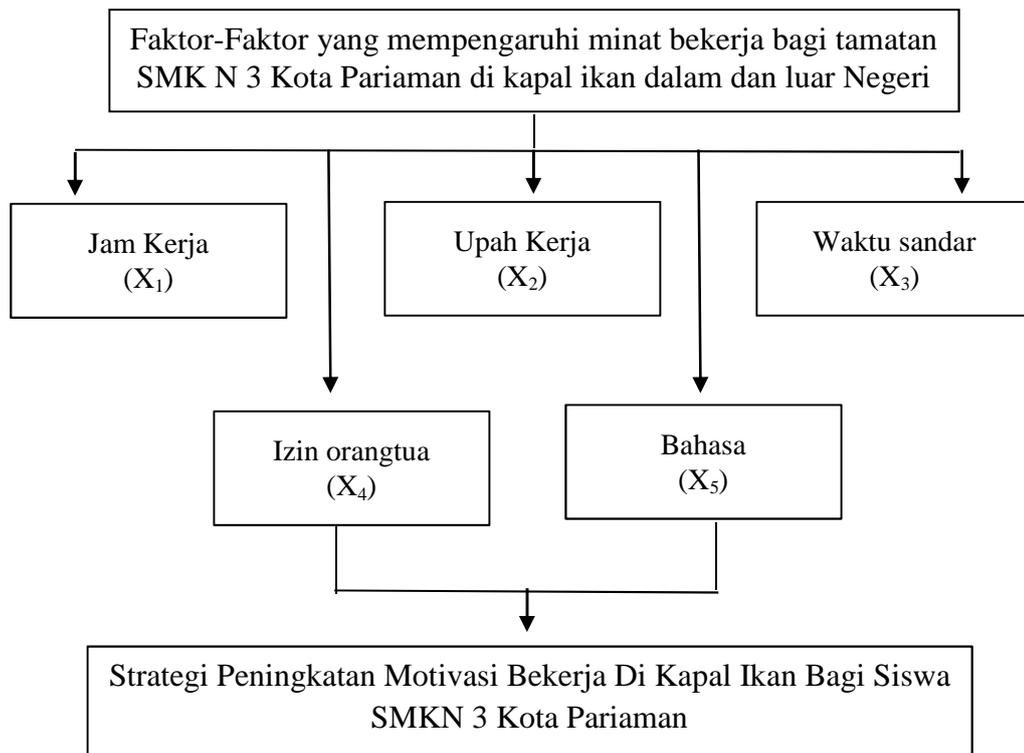
1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bahan masukan bagi peneliti lain yang berminat pada masalah yang sama, dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terhadap motivasi minat tamatan untuk bekerja sesuai dengan bidang keahlian.
2. Bagi instansi/dinas/lembaga terkait sebagai salah satu bahan masukan dan pertimbangan dalam menerapkan peningkatan perhatian terhadap ABK di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BEKERJA BAGI TAMATAN SMKN 3 KOTA PARIAMAN DI KAPAL IKAN DALAM DAN LUAR NEGERI



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian